



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang	: 2025 – 2026
Masa Persidangan	: V
Rapat Ke-	: 11
Jenis Rapat	: Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Kamis, 11 Juni 2026
Waktu	: Pukul 10.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA 2027 dan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2027.
Ketua Rapat	: Aria Bima/ Wakil Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dahliya Bahnan, S.H., M.H./Kabag Set. Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 15 (lima belas) dari 42 (empat puluh dua) Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI; B. Menteri Dalam Negeri/Kepala BNPP; C. Ketua DKPP; D. Kepala OIKN;

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI, dengan agenda Pembahasan laporan keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2025 dan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA 2027 dan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2027 yang dilaksanakan hari Kamis, 11 Juni 2026, dibuka pukul 10.20 WIB oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK-POKOK PEMBAHASAN

Pokok – pokok pembahasan pada Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI, dengan agenda Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA

2027 dan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2027 yang dilaksanakan hari Kamis, 11 Juni 2026, sebagai berikut:

▪ **Materi Menteri Dalam Negeri/Kepala BNPP**

1. Gambaran Umum Anggaran Kemendagri 2027:

- Pagu indikatif Kemendagri TA 2027 sebesar Rp4,66 triliun.
- Turun Rp3,14 triliun (40%) dibanding pagu 2026 sebesar Rp7,8 triliun.
- Penurunan terutama berasal dari berkurangnya anggaran Rupiah Murni untuk kegiatan strategis.

2. Komposisi Pagu Indikatif 2027:

- Belanja operasional: **Rp1,73 triliun.**
- Belanja non-operasional: **Rp2,93 triliun.**
- Sumber dana: Rupiah Murni: Rp2,41 triliun; Pinjaman Luar Negeri: Rp2,16 triliun; PNBPN: Rp53,46 miliar; Hibah Luar Negeri: Rp25,89 miliar.

3. Usulan Kebutuhan Anggaran 2027:

- Kemendagri mengusulkan tambahan anggaran Rp6,28 triliun.
- Total kebutuhan anggaran 2027 menjadi Rp10,94 triliun.

4. Kekurangan Anggaran Utama

- Pemeliharaan dan operasional perkantoran: Rp169,2 miliar.
- Belanja non-operasional Rupiah Murni: Rp5,01 triliun.
- Pinjaman luar negeri (LSDP): Rp444,6 miliar.
- PNBPN Dukcapil: Rp651,7 miliar.

5. Prioritas Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN)

- Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera.
- Dukungan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
- Penuntasan Tuberkulosis (TBC).
- Penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
- Dukungan Program 3 Juta Rumah.
- Optimalisasi SIPD dan Pusat Data Nasional.
- Percepatan pembangunan daerah 3T.
- Pengendalian sampah terpadu (Gerakan ASRI).
- Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG).

6. Belanja Wajib dan Tidak Dapat Ditunda

- Penguatan Jaringan Komunikasi Data (Jarkomdat).
- Pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
- Rehabilitasi sarana-prasarana IPDN dan BPSDM.
- Renovasi gedung arsip Kemendagri.
- Pengadaan blangko KTP-el dan seleksi Praja IPDN.
- Seleksi anggota KPU dan Bawaslu.

▪ **Materi Kepala OIKN**

1. Prioritas Pembangunan IKN 2025–2029

- Penataan ruang dan pembangunan kawasan inti pemerintahan (KIPP).
- Pembangunan gedung legislatif dan yudikatif.

- Penyediaan hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan.
 - Pembangunan infrastruktur dasar (air minum, air limbah, persampahan).
 - Penguatan aksesibilitas dan konektivitas (jalan, MUT, transportasi umum).
 - Pemindahan ASN, personel Hankam, dan pejabat negara.
 - Pengembangan sistem pemerintahan cerdas (smart city).
2. Kebutuhan Anggaran Pembangunan IKN
 - TA 2025: Rp10,1 triliun (efektif Rp8,9 triliun).
 - TA 2026: Rp6,2 triliun (efektif Rp5,4 triliun).
 - Pagu indikatif TA 2027: Rp6,7 triliun
 3. Proyek Pembangunan Tahap II
 - Batch 1 (2025) senilai Rp3,7 triliun telah selesai Desember 2025: Jalan dan MUT KIPP 1B–1C, Penataan kawasan dan ruang terbuka hijau.
 - Batch 2 (2025–2027) kebutuhan Rp20 triliun: kantor lembaga legislatif dan yudikatif, jalan dan MUT Kawasan legislatif-yudikatif.
 - Batch 3 kebutuhan Rp17,2 triliun: hunian vertikal bagi pimpinan, anggota, dan staf legislatif-yudikatif, Jalan dan MUT menuju kawasan hunian dan diplomatik, embung dan jaringan perpipaan.
 4. RKA-K/L Otorita IKN TA 2027
 - Total pagu indikatif: Rp6,72 triliun.
 - Komposisi program: Program Dukungan Manajemen: Rp592 miliar (9%), Program Pengembangan Kawasan Strategis: Rp6,1 triliun (91%).
 - Komposisi belanja: belanja pegawai 5%, belanja barang 13%, belanja modal 82%.
 5. Usulan tambahan anggaran TA 2027:
 - Otorita IKN mengusulkan tambahan anggaran Rp15,53 triliun, dengan rincian: batch 2 (MYC 2025-2027) Rp7,43 triliun, batch 3 (MYC 2026-2028) Rp8 triliun.

▪ **Materi Ketua DKPP**

1. Prioritas Kerja DKPP 2027:
 - Penegakan kode etik melalui penanganan pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.
 - Penilaian **Indeks Kepatuhan Etik Penyelenggara Pemilu (IKEPP)**.
 - Penguatan kegiatan preventif penegakan kode etik.
 - Penguatan kelembagaan DKPP sesuai regulasi baru.
 - Implementasi Grand Design/Road Map DKPP.
 - Peningkatan kapasitas SDM DKPP.
2. Dukungan terhadap Prioritas Nasional
 - Penanganan pengaduan etik dan pemetaan IKEPP mendukung **Prioritas Nasional (PN-7) RPJMN 2025–2029**.
 - Bertujuan memperkuat integritas, profesionalitas, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu.

3. Pagu Indikatif DKPP Tahun 2027:
 - Pagu indikatif DKPP 2027 sebesar Rp39,41 miliar.
 - Hanya memenuhi 36,13% dari usulan kebutuhan anggaran DKPP sebesar Rp109,09 miliar.
 - Jika dibandingkan pagu 2026, alokasi 2027 hanya 37,47% dari anggaran tahun sebelumnya.
4. Komposisi Pagu Indikatif 2027:
 - Belanja Pegawai: Rp21,19 miliar.
 - Belanja Operasional Perkantoran: Rp18,22 miliar.
5. Usulan Tambahan Anggaran 2027
 DKPP mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp69,68 miliar, dengan rincian sebagai berikut:
 - Penanganan pengaduan pelanggaran kode etik: Rp32,44 miliar.
 - Penilaian IKEPP: Rp7,39 miliar.
 - Dukungan manajemen internal: Rp24,86 miliar.
 - Sewa gedung dan mobilisasi: Rp5 miliar.

III. KESIMPULAN RAPAT

1. Komisi II DPR RI telah menerima penyampaian Pagu Indikatif RAPBN Tahun 2027 Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebesar **Rp4.656.772.482.000,- (empat trilyun enam ratus lima puluh enam milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah)**, sudah termasuk pagu indikatif Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Tahun 2027 sebesar **Rp39.407.888.000,- (tiga puluh sembilan milyar empat ratus tujuh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)** dan akan membahasnya secara mendalam pada rapat pembahasan RAPBN tahun 2027 selanjutnya.
2. Komisi II DPR RI telah menerima penyampaian Pagu Indikatif RAPBN Tahun 2027 Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) sebesar **Rp213.926.206.000,- (dua ratus tiga belas milyar sembilan ratus dua puluh enam juta dua ratus enam ribu rupiah)** dan akan membahasnya secara mendalam pada rapat pembahasan RAPBN tahun 2027 selanjutnya.
3. Komisi II DPR RI telah menerima penyampaian Pagu Indikatif RAPBN Tahun 2027 Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) sebesar **Rp6.720.343.578.000,- (enam trilyun tujuh ratus dua puluh milyar tiga ratus empat puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)** dan akan membahasnya secara mendalam pada rapat pembahasan RAPBN tahun 2027 selanjutnya.
4. Terhadap usulan tambahan anggaran yang diusulkan oleh Kemendagri, BNPP, DKPP dan OIKN sebagai berikut:
 - a. Usulan tambahan anggaran tahun 2027 Kemendagri sebesar **Rp6.278.698.240.000,- (enam trilyun dua ratus tujuh puluh delapan**

milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), termasuk di dalamnya usulan tambahan anggaran tahun 2027 DKPP sebesar ***Rp69.678.576.000,- (enam puluh sembilan milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)***.

- b. Usulan tambahan anggaran tahun 2027 BNPP sebesar ***Rp231.544.419.500,- (dua ratus tiga puluh satu milyar lima ratus empat puluh empat juta empat ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah)***.
- c. Usulan tambahan anggaran tahun 2027 OIKN sebesar ***Rp15.526.835.057.000,- (lima belas trilyun lima ratus dua puluh enam milyar delapan ratus tiga puluh lima juta lima puluh tujuh ribu rupiah)***.

Komisi II DPR RI mendukung sepenuhnya usulan tambahan anggaran tersebut dan akan membahasnya secara mendalam pada Raker RDP yang akan datang.

- 5. Komisi II DPR RI meminta Kemendagri, BNPP, DKPP dan OIKN untuk segera menyampaikan matriks rinci program-program prioritas yang terdampak langsung oleh penetapan Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2027 dan segera melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas guna memperjuangkan pemenuhan usulan tambahan anggaran tahun 2027 tersebut, dengan tetap memperhatikan urgensi keberlangsungan program-program yang bersentuhan langsung dengan layanan publik dan proyek strategis nasional.
- 6. Komisi II DPR RI meminta kepada Kemendagri, BNPP, DKPP, dan OIKN untuk segera menyampaikan alokasi anggaran tahun 2026 beserta rincian dan perubahannya sesuai dengan jenis belanja dan kegiatan serta target dan capaian kinerja kepada Sekretariat Komisi II DPR RI sebagai bahan pendukung rapat pembahasan RAPBN tahun 2027 yang akan datang.

IV. PENUTUP

Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat ditutup pukul 13.40 WIB.

JAKARTA, 11 Juni 2026
KETUA RAPAT

TTD

Aria Bima
A-200